

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Yogyakarta menempatkan pariwisata sebagai sektor untuk meningkatkan pendapatan daerah. Daerah yang terkenal karena keistimewaannya ini merupakan salah satu tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara karena memiliki objek-objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Objek-objek tersebut diantaranya berbentuk wisata budaya, wisata seni dan kerajinan, wisata pendidikan dan wisata alam. Pengembangan kawasan wisata oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dilakukan di semua wilayah yang meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul.

Salah satu tujuan pembangunan kepariwisataan DIY sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata DIY (RIPPARDA) yaitu mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerja sama antar usaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat (Pemerintah Provinsi, 2012). Hal yang menarik terkait pengembangan kawasan wisata di Yogyakarta ialah bahwa pengembangan tidak hanya dilakukan di daerah perkotaan melainkan juga di daerah perdesaan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk pemeratakan pendapatan di semua wilayah di Yogyakarta, yaitu dengan cara menggiring wisatawan agar tidak hanya terpusat di daerah perkotaan saja.

Menurut Hadi & Pribadi (2011), kawasan perkotaan dan perdesaan harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kemajuan. Berdasarkan tingkat kemajuan, kedua kawasan tersebut tidak bisa diukur dengan hanya melihat tingkat kepadatan penduduk dan ketersediaan infrastruktur. Jika demikian, wilayah perkotaan pasti akan dinilai lebih maju dari pada perdesaan. Kemajuan di dua kawasan tersebut seharusnya diukur dengan melihat pengembangan sektor yang dominan di masing-masing kawasan. Kawasan perkotaan sektor dominannya adalah jasa dan perdagangan, sedang kawasan perdesaan adalah pertanian dalam arti luas.

Desa wisata dijadikan salah satu strategi pengembangan wisata yang berbasis penguatan identitas dan ciri khas suatu daerah. Tujuannya menurut Sastrayuda (2010) yaitu mengupayakan agar masyarakat setempat dapat berperan aktif dalam pembuatan keputusan tentang bentuk pariwisata yang memanfaatkan kawasan lingkungannya dan mendapat jaminan memperoleh bagian pendapatan yang pantas dari kegiatan pariwisata. Masyarakat di lokasi desa wisata harus menjadi subjek yang memutuskan arah pengembangan kawasannya. Upaya ini dilakukan karena masyarakat lebih mengenali potensi yang ada di wilayahnya. Hasil dari pengembangan tersebut nantinya akan dinikmati oleh masyarakat. Inilah bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.

Kabupaten Bantul merupakan daerah dengan desa wisata yang menawarkan keunggulan beragam. Daerah yang memiliki potensi lengkap seperti alam, budaya, kuliner, kerajinan dan kesenian serta pertanian ini dinilai sesuai untuk mengembangkan konsep desa wisata. Kedekatan akses dengan daerah perkotaan

Yogyakarta yang menjadi magnet bagi wisatawan juga mendukung konsep tersebut.

Salah satu desa wisata yaitu Kebonagung menawarkan kegiatan pertanian sebagai unggulan untuk menarik wisatawan. Pertanian merupakan sektor yang dominan di daerah ini. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip kepariwisataan menurut UU nomor 10 tahun 2009 yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal; memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas; memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; dan memberdayakan masyarakat setempat.

Desa Wisata Kebonagung dirintis oleh para tokoh masyarakat, setelah mencermati berbagai kecenderungan hidup masyarakat kota dan potensi desa yang dimiliki. Sejak tahun 1998 para tokoh masyarakat Desa Kebonagung merintis keberadaan Kebonagung sebagai desa wisata. Perintisan tersebut dilakukan dengan melibatkan anggota masyarakat. Pengelolaan desa wisata kemudian dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tambak Tegal Agung yang dibentuk pada tahun 2003. Status Kebonagung sebagai desa wisata telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 359 Tahun 2006 tanggal 16 Desember 2006 (Kantor Pengolahan Data dan Elektronik Kabupaten Bantul, 2012).

## **B. Rumusan Masalah**

Desa Wisata Kebonagung merupakan salah satu desa wisata terbaik di Provinsi DIY. Desa ini pernah mendapatkan penghargaan sebagai Juara 2 dalam lomba desa wisata tingkat Provinsi DIY. Desa Kebonagung, Imogiri Bantul juga terpilih sebagai salah satu pilot proyek Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri 2010 berbasis Pariwisata bersama dengan 10 desa wisata lainnya di Indonesia (Made, 2010). Hal ini menunjukkan adanya pengelolaan baik yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Pengelolaan tersebut dilakukan oleh sebuah kelompok yang disebut Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Kelompok ini merupakan bentukan pemerintah untuk mendukung bidang kepariwisataan di daerah. Pokdarwis berfungsi untuk menjaga, melestarikan, mempersiapkan dan menjual potensi sebuah daerah agar dijadikan objek wisata. Selain itu, Pokdarwis diharapkan dapat memberikan penyadaran kepada masyarakat agar menyadari potensi wisata di daerahnya.

Pokdarwis Tambak Tegal Agung Desa Kebonagung melakukan upaya untuk menyadarkan masyarakat yang berkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungannya. Desa Kebonagung memiliki potensi yang dikembangkan menjadi paket desa wisata. Beberapa paket wisata yang terdapat di desa ini yaitu pendidikan pertanian, wisata Bendung Tegal, wisata keliling desa dengan bersepeda, wisata seni dan budaya seperti karawitan dan membatik. Upaya penyadaran Pokdarwis Kebonagung dilakukan dengan mengkomunikasikan pesan untuk pengembangan dan pemeliharaan kawasan desa wisata. Pesan tersebut berupa Sadar Wisata dan Sapta Pesona.

Desa Wisata Kebonagung sudah berusia lebih dari 15 tahun dan masih beraktivitas dengan menerima kunjungan dari wisatawan. Keberlangsungan pengelolaan yang sudah lama tersebut menandakan adanya peran dan dukungan

masyarakat yang baik dalam membangun sebuah desa wisata. Masyarakat menyadari bahwa desa wisata dapat memberikan manfaat bagi dirinya.

Komunikasi yang terjadi di Desa Wisata Kebonagung diduga cukup efektif karena pesan yang disampaikan dipahami oleh masyarakat. Masyarakat menyadari peran dan tanggung jawabnya sebagai tuan rumah (*host*) yang baik bagi wisatawan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi dalam pengelolaan Desa Wisata Kebonagung. Selanjutnya dari proses komunikasi tersebut akan dianalisis bagaimana efek komunikasi yang terjadi masyarakat.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya, ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan profil masyarakat, potensi alam dan paket wisata di Desa Wisata Kebonagung.
2. Mendeskripsikan profil Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tambak Tegal Agung.
3. Mendeskripsikan proses komunikasi dalam pengelolaan Desa Wisata Kebonagung.
4. Menganalisis efek komunikasi yang terjadi di masyarakat Desa Wisata Kebonagung.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi, masyarakat dan pemerintah atau instansi terkait.

##### **1. Bagi Kalangan Akademisi**

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses komunikasi dalam pengelolaan desa wisata.

##### **2. Bagi Masyarakat dan Pemerintah atau Instansi Terkait**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah atau instansi terkait. Masyarakat dapat memberikan informasi yang sebenarnya mengenai keterlibatan mereka dalam program, saran, kritik, dan aspirasinya sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak khususnya pemerintah. Sedangkan bagi pemerintah atau instansi terkait, penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan pengembangan desa wisata di Indonesia.